

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN  
DI KECAMATAN MEDAN BELAWAN  
KOTA MEDAN**

Daffa Andika Nasution

NPP. 31.0054

*Asdaf Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara*

*Program Studi: Pemberdayaan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: [nasutiondaffa67@gmail.com](mailto:nasutiondaffa67@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Mulyana, S.E, M.Si.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The issue of poverty is indeed a complex and multidimensional problem. The number of poor residents in Medan Belawan District has significantly increased. Purpose:* identify and describe community empowerment through the Program Keluarga Harapan (PKH) in alleviating poverty in Medan Belawan District, Medan City, and to determine the factors that hinder community empowerment and the efforts made to overcome these obstacles **Method:** *This research employs a qualitative approach with an inductive method. The data collection techniques include interviews, observations, and documentation. Result:* , in general, community empowerment through the Program Keluarga Harapan (PKH) in alleviating poverty in Medan Belawan District, Medan City, has been running well and smoothly, although there are still some obstacles in its implementation. **Conclusion:** *Based on research in Medan Belawan District, the Family Hope Program (PKH) has proven successful in empowering communities with the principles of equality, participation, independence and sustainability. However, there are still obstacles such as low self-confidence among KPMs and limited supporting facilities. It is recommended to increase KPM's self-confidence through skills training and improving assistance facilities, including accommodation costs in the budget. Further suggestions include increasing monitoring and evaluation as well as optimizing resources to support the implementation of PKH in this area to achieve the goal of effectively alleviating poverty.*

**Keywords:** *Empowerment, Program Keluarga Harapan (PKH), Poverty*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi. Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Medan Belawan mengalami peningkatan yang signifikan **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dan mengetahui faktor penghambat pemberdayaan masyarakat serta upaya dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi,

kemudian dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan sudah berjalan dengan baik dan lancar, meskipun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian di Kecamatan Medan Belawan, Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti berhasil dalam pemberdayaan masyarakat dengan prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan seperti rendahnya kepercayaan diri KPM dan keterbatasan sarana pendamping. Disarankan untuk meningkatkan kepercayaan diri KPM melalui pelatihan keterampilan dan memperbaiki fasilitas pendampingan, termasuk biaya akomodasi dalam anggaran. Saran lebih lanjut mencakup peningkatan monitoring dan evaluasi serta optimalisasi sumber daya untuk mendukung pelaksanaan PKH di daerah ini demi mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara efektif.

**Kata kunci:** *Pemberdayaan, Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan masif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Istilah “kemiskinan” muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi tingkat kesejahteraan ekonomi minimum yang dianggap sebagai kebutuhan dasar suatu taraf hidup tertentu (Delfi Heni Susanti et al., 2022).

Kemiskinan telah menjadi isu yang signifikan di Indonesia, dimana upaya penanggulangannya hingga saat ini belum mencapai hasil yang memuaskan. Program telah dilaksanakan, namun kemiskinan masih menjadi masalah utama di negara kita. Tentu sudah banyak implementasi mengenai program pengentasan kemiskinan, meski tidak memberikan hasil yang diinginkan, telah menimbulkan banyak pertanyaan di dalam pemerintahan. Hal ini berpotensi menghambat kemajuan Indonesia dalam mencapai status sebagai negara maju (Sahib, 2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada rumah tangga sangat miskin dan berfungsi sebagai program pengentasan kemiskinan. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH” (Kemensos.go.id, 2020). Program Keluarga Harapan bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga merupakan upaya untuk memberdayakan keluarga miskin agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain bantuan langsung, PKH juga menyediakan program pelatihan keterampilan dan pendidikan untuk membantu keluarga miskin meningkatkan kapasitas mereka dalam mencari pekerjaan yang lebih baik dan berinvestasi dalam pendidikan anak-anak. Penelitian yang dilakukan oleh Sahib menjelaskan bahwa PKH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan yaitu sebesar 38,4% (Sahib, 2021).

Hadirnya Program Keluarga Harapan (PKH) di tengah-tengah masyarakat tentunya pemerintah mengharapkan kasus kemiskinan di Indonesia akan berkurang. Program ini dapat berpengaruh bagi program untuk pengentasan kemiskinan lainnya. Namun senantiasa disadari bahwa fakta itu diantara berbagai program yang dihadirkan untuk menangani permasalahan atas kemiskinan yang sudah diterapkan pemerintah, namun angka kemiskinan di Indonesia masih tetap buruk.

Presentasi menurunnya kasus kemiskinan di Indonesia tidak terlihat signifikan (Badan Pusat Statistik, 2023).

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan berkaitan dengan kemiskinan yang ada di Kota Medan. Tabel berikut merupakan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Tahun 2019-2022

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan 2019-2022**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
2019	15.374
2020	15.097
2021	22.817
2022	24.729

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2023)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan mengalami peningkatan yang drastis, terutama tahun 2020-2022. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kecamatan Medan Belawan sebanyak 15.374 jiwa. Selanjutnya di tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 15.097 jiwa. Kemudian di tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan drastis menjadi 22.817 jiwa. Selanjutnya tahun 2022 jumlah penduduk miskin kembali mengalami peningkatan menjadi 24.729 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2023). Data selanjutnya merupakan data penerima program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Medan Belawan tahun 2020-2022.

**Tabel 1. 2**  
**Data Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Medan Belawan 2020-2022**

Tahun	Keluarga Penerima Manfaat (Jiwa)
2020	5.948
2021	6.582
2022	6.767

Sumber: (Dinas Sosial Kota Medan, 2023)

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Penelitian Zaili Rusli yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan" hasil penelitian menunjukkan bahwa, program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program UEK- SP di Kota Pekanbaru meskipun menghadapi banyak kendala, namun mampu berjalan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ada (Rusli, 2012). Penelitian Zaili Rusli, Febri Yuliani, Endang Sulistianingsih, Adianto dan Abdul Sadad yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)" hasil

penelitian menunjukkan bahwa, masyarakat memiliki pengetahuan tentang program UED-SP dan proses penentuan kelompok sasaran berkat sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Penelitian ini juga menekankan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat miskin (Rusli et al., 2012). Penelitian Ibrahim Imron, Mochammad Saleh Soeaidy dan Heru Ribawanto yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa, langkah pemerintah dalam pembentukan KUBE sangat baik, namun terlalu banyak kelompok yang terbentuk di Desa Dawuhan sehingga tidak efektif dan efisien. Penelitian ini menyarankan agar upaya pemberdayaan masyarakat di masa depan harus fokus pada pemilihan masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan, mencari solusi, melaksanakan tindakan nyata, dan mengevaluasi seluruh proses pemberdayaan (Imron et al., 2014). Penelitian Muhammad Hidayat Nasmi dan Karjuni Dt. Maani yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan” hasil penelitian menunjukkan bahwa, program tersebut belum berhasil memperbaiki kondisi masyarakat yang tergabung dalam program KUBE (Nasmi & Dt.Maani, 2019). Terakhir, penelitian Ismi Fitra Adriani yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tampan Kota Kota Pekanbaru” hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun untuk tujuan pemberdayaan masih belum sepenuhnya terwujud (Adriani, 2023)

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Terdapat perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang dilakukan di Kecamatan Medan Belawan. Teori yang digunakan oleh penulis menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Najiyati yang terdiri dari empat dimensi yaitu, Kesetaraan, Partisipasi, Kemandirian, dan Keberlanjutan (Najiyati et al., 2006).

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dan mengetahui faktor penghambat pemberdayaan masyarakat serta upaya dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kejadian atau fenomena dan kenyataan sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasar pada postpositivisme, yang dipakai untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2015).

Penulis mengumpulkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan apa yang dijelaskan Simangungsong (Simangungsong, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap tujuh informan yang terdiri dari, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas

Sosial Kota Medan, Koordinator PKH Kota Medan, Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Kecamatan Medan Belawan Kota Medan sebanyak tiga orang.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan**

##### **3.1.1. Kesetaraan**

Prinsip utama dalam proses pemberdayaan masyarakat menekankan pada kesetaraan antara masyarakat dengan lembaga pelaksana program pemberdayaan. Dinamika yang dibangun mencakup hubungan setara melalui mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian untuk memfasilitasi pembelajaran bersama. Kesetaraan ini tidak memandang gender dan bertujuan untuk memupuk keberagaman pengetahuan dan keterampilan.

Prinsip kesetaraan mencakup dua indikator utama: hak dan kewajiban serta keadilan. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Medan Belawan, program ini telah dilaksanakan dengan baik sejak diperkenalkan pada tahun 2007. Dinas Sosial Kota Medan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai bagian dari hak mereka, sementara KPM juga menjalankan kewajiban sesuai peraturan yang ada. Pelaksanaan PKH melibatkan kerjasama antara Dinas Sosial, koordinator PKH, pendamping PKH, dan KPM, yang semuanya berperan aktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan dan para pendamping PKH kepada KPM dilaksanakan dengan mematuhi peraturan dan pedoman yang berlaku. KPM yang memenuhi kewajiban mereka mendapatkan hak-hak mereka secara adil dan setara, yang mencakup bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kesehatan. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan dalam pemberdayaan masyarakat melalui PKH yang berjalan efektif di Kecamatan Medan Belawan, dengan tujuan akhir menuntaskan kemiskinan melalui kerjasama yang baik di antara semua pihak terkait.

##### **3.1.2 Partisipasi**

Prinsip partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat menekankan pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup pemberian ruang untuk suara mereka, kontribusi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan atau program, serta pengakuan akan pentingnya perspektif dan pengalaman mereka. Partisipasi juga melibatkan penguatan kapasitas individu atau kelompok melalui akses informasi, pendidikan, dan pelatihan yang diperlukan. Prinsip ini mendukung demokrasi, inklusi, dan keterlibatan aktif untuk membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Program pemberdayaan yang efektif adalah yang bersifat partisipatif, dirancang, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, mencapai tahap ini membutuhkan waktu dan pendampingan dari relawan yang berkomitmen. Prinsip partisipasi mencakup empat indikator: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Wawancara dengan Kepala Dinas

Sosial Kota Medan mengungkapkan bahwa perencanaan PKH dilakukan melalui pertemuan rutin dengan pendamping PKH untuk membahas penyaluran dana dan kegiatan P2K2. Koordinator PKH Kota Medan menekankan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan instruksi dari Kementerian Sosial, sementara Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menekankan pentingnya pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Evaluasi rutin setiap triwulan memastikan kebijakan berjalan efektif dan efisien. Wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunjukkan bahwa bantuan PKH sangat membantu kebutuhan sehari-hari, dengan partisipasi aktif KPM dalam kegiatan dan pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip partisipasi dalam PKH di Kecamatan Medan Belawan menunjukkan pemberdayaan masyarakat yang efektif, dengan keterlibatan aktif dari Dinas Sosial, koordinator, pendamping, dan KPM dalam setiap tahap program, menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan untuk menanggulangi kemiskinan.

### **3.1.3. Kemandirian**

Prinsip kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya menghargai dan mengutamakan kemampuan individu atau kelompok daripada ketergantungan pada bantuan pihak lain. Konsep ini melihat penyandang disabilitas sebagai subjek dengan potensi yang dapat dikembangkan, bukan sebagai objek yang tidak memiliki kemampuan. Prinsip ini bertujuan untuk memberdayakan individu atau kelompok agar mampu mengelola kehidupan mereka sendiri secara mandiri melalui pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan. Ini juga mencakup pemberian otonomi dalam pengambilan keputusan dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Kemandirian menekankan pentingnya tanggung jawab, inisiatif pribadi, dan kapasitas untuk bekerja kolaboratif jika diperlukan, dengan tujuan membebaskan individu dari ketergantungan yang tidak sehat dan memungkinkan mereka mencapai kemandirian sesuai kebutuhan dan keinginan mereka.

Prinsip kemandirian ini mencakup dua indikator utama: kemampuan pengambilan keputusan dan kemampuan produktivitas. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Khoiruddin, pelaksanaan PKH melibatkan tugas Dinas Sosial dalam memberikan arahan kepada koordinator dan pendamping PKH untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Bapak Ronald Fredy Sihotang, menambahkan bahwa bimbingan dan pengingat hak dan kewajiban kepada KPM sangat penting untuk memastikan pemanfaatan dana bantuan yang tepat. Koordinator PKH Kota Medan, Bapak Rinaldy Sitorus, serta Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Medan Belawan, Ibu Rauni Rasoky Pulungan, menekankan pentingnya memanfaatkan dana bantuan untuk kegiatan produktif seperti usaha kecil, yang dapat meningkatkan taraf hidup KPM dan mengentaskan kemiskinan. Wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH, Bapak Ayong Putra Pribadi, menunjukkan bahwa bantuan PKH telah digunakan untuk memulai usaha kecil, yang membantu menutupi kebutuhan keluarga secara lebih mandiri.

Secara keseluruhan, prinsip kemandirian yang diterapkan melalui PKH di Kecamatan Medan Belawan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik. Para pelaksana PKH memberikan arahan dan dukungan yang tepat, sementara KPM berusaha memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini mencerminkan upaya kolektif dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut.

### **3.1.4. Berkelanjutan**

Prinsip berkelanjutan dalam program pemberdayaan menekankan pentingnya keberlangsungan program dan pengelolaan sumber daya secara efektif. Pada awalnya, fasilitator mungkin lebih dominan daripada masyarakat itu sendiri, namun seiring waktu, peran fasilitator akan berkurang dan masyarakat akan mampu mengontrol kegiatan mereka secara mandiri. Keberlangsungan program dan pengelolaan sumber daya adalah dua indikator utama dari prinsip ini.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Khoiruddin, pelaksanaan kebijakan PKH menghadapi kendala dalam penggunaan teknologi dan anggaran. Pembaruan aplikasi e-PKH menjadi SIKS-NG dan penggunaan dana pribadi oleh koordinator dan pendamping PKH untuk kegiatan lapangan adalah contoh kendala yang dihadapi. Namun, dukungan dari dana daerah untuk sarana dan prasarana pendamping PKH membantu mengatasi beberapa masalah ini. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Bapak Ronald Fredy Sihotang, menambahkan bahwa SDM Dinas Sosial Kota Medan cukup memadai untuk pelaksanaan program ini, dengan banyaknya pegawai yang saling membantu dan bekerja sama. Terkait keberlangsungan program, keputusan ada pada Kementerian Sosial RI. Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Khoiruddin, mengungkapkan harapannya agar PKH terus berlanjut, mengingat program ini sudah ada sejak 2007 dan peran serta semua pihak sangat penting dalam keberhasilannya. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Bapak Ronald Fredy Sihotang, dan Koordinator PKH Kota Medan, Bapak Rinaldy Sitorus, juga menyatakan harapan yang sama, menekankan bahwa PKH adalah prioritas dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan. Keluarga Penerima Manfaat, Ibu Upik Nur Jannah, menambahkan bahwa bantuan PKH sangat membantu dalam meningkatkan pendidikan anak-anak mereka dan berharap program ini terus berlanjut.

Secara keseluruhan, prinsip berkelanjutan yang mencakup pengelolaan sumber daya dan keberlangsungan program menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui PKH di Kecamatan Medan Belawan sudah berjalan dengan baik. Pelaksana PKH dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendukung kelanjutan program ini, yang mencerminkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan dan pedoman, serta upaya bersama untuk meningkatkan taraf hidup dan mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut.

### **3.2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan**

Faktor penghambat merupakan elemen yang menghalangi atau menahan proses sehingga menyebabkan ketidaklancaran atau penundaan. Pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, meskipun sudah sesuai aturan dan pedoman, masih menghadapi beberapa hambatan.

Pertama, rendahnya kepercayaan diri Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagian besar KPM tidak mampu berinovasi dan melihat peluang dalam berwirausaha. Koordinator pendamping PKH Kecamatan Medan Belawan, Ibu Rauni Rasoky Pulungan, mengungkapkan bahwa meskipun motivasi dan dorongan untuk berwirausaha telah diberikan, mindset dan karakter KPM yang merasa nyaman dengan bantuan menyebabkan mereka enggan untuk berwirausaha. Kepala Dinas Sosial Kota Medan juga menyatakan bahwa meskipun kesejahteraan KPM telah meningkat, banyak yang enggan untuk graduasi karena kesadaran yang kurang dan karakter yang senang dibantu. Kedua, keterbatasan

sarana dan prasarana pendamping PKH. Pendamping PKH yang berinteraksi langsung dengan KPM membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Meskipun ada dana sharing dari Pemerintah Kota Medan untuk mendukung tugas pendamping, bantuan berupa laptop dan kendaraan dinas masih terbatas dan diberikan secara bertahap. Koordinator pendamping PKH, Ibu Rauni Rasoky Pulungan, menyatakan bahwa akomodasi untuk tugas lapangan masih menggunakan dana pribadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui PKH di Kecamatan Medan Belawan menghadapi hambatan dari sisi kepercayaan diri KPM dan keterbatasan sarana prasarana pendamping. Untuk mencapai target pengentasan kemiskinan, perlu perhatian lebih terhadap peningkatan kepercayaan diri KPM dan penyediaan sarana prasarana yang memadai bagi pendamping PKH.

### **3.3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan**

Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya melalui pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun program ini telah berjalan sesuai aturan, masih ada hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kepercayaan diri Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Banyak KPM yang tidak percaya diri untuk berinovasi dan memanfaatkan peluang usaha, sehingga mereka cenderung nyaman menerima bantuan tanpa berusaha untuk mandiri. Untuk mengatasi masalah ini, para pendamping PKH secara konsisten memberikan motivasi dan dukungan agar KPM dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Melalui pertemuan P2K2, pendamping PKH menyampaikan pentingnya membuka usaha untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, pendamping juga diharapkan memberikan pelatihan keterampilan khusus sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh KPM, sehingga mereka dapat mengembangkan bakat tersebut dan menambah penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hambatan lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai bagi pendamping PKH.

Meskipun Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial telah memberikan fasilitas seperti sepeda motor dan laptop untuk mendukung tugas pendamping, pemberian fasilitas ini dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan anggaran daerah. Pendamping PKH sering kali harus menanggung biaya akomodasi sendiri saat melakukan monitoring dan berinteraksi langsung dengan KPM. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana, termasuk memasukkan biaya akomodasi pendamping PKH dalam rencana anggaran Dinas Sosial ke depannya. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pendamping PKH dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Selama melaksanakan penelitian penulis telah menemukan hal yang sama dengan penelitian terdahulu, dimana temuan penelitian penulis adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat telah berjalan optimal, namun memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Ismi Fitra Adriani Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun untuk tujuan pemberdayaan masih belum

sepenuhnya terwujud, karena masih ada sebagian anggota yang tidak memanfaatkan bantuan dari PKH sesuai dengan ketentuan pedoman umum Program Keluarga Harapan (PKH), masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Program Keluarga Harapan (PKH), serta masih kurangnya pengawasan oleh pendamping PKH. Sehingga perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tampan untuk kesesuaian dari segi penerima dan pendamping (Adriani, 2023). Kemudian penelitian dari Zaili Rusli, Febri Yuliani, Endang Sulistianingsih, Adianto, dan Abdul Sadad menemukan bahwa, masyarakat memiliki pengetahuan tentang program UED-SP dan proses penentuan kelompok sasaran berkat sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Penelitian ini juga menekankan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Masyarakat miskin dianggap sebagai sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak, dan memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan daya (*power*) yang dimiliki (Rusli et al., 2012).

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa program ini berjalan baik dan sesuai dengan prinsip pemberdayaan. Analisis menunjukkan bahwa semua pihak Dinas Sosial, koordinator, pendamping PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bekerja sama efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Partisipasi seluruh pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program berjalan lancar. Prinsip kemandirian menunjukkan hasil positif, meskipun keberhasilan akhir tergantung pada bagaimana KPM memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Prinsip berkelanjutan tercapai, dengan pelaksana PKH dan KPM menginginkan program ini terus berlanjut, menunjukkan keberhasilan pemberdayaan sesuai peraturan dan pedoman yang ada. Hambatan utama adalah rendahnya kepercayaan diri KPM yang cenderung malas dan enggan melakukan graduasi serta keterbatasan sarana dan prasarana pendamping PKH. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu meningkatkan kepercayaan diri KPM melalui pelatihan keterampilan sesuai bakat mereka, serta memperbaiki sarana dan prasarana bagi pendamping PKH, termasuk biaya akomodasi dalam rencana anggaran Dinas Sosial ke depan.

Disarankan agar Pemerintah Kota Medan dan Dinas Sosial lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendukung PKH untuk memantau perkembangan dan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, sehingga solusi dapat segera dicari bersama-sama. Pengaturan yang lebih baik terkait sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan PKH di Kecamatan Medan Belawan, agar tujuan mengentaskan kemiskinan tercapai lebih efektif.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program PKH agar dapat memberikan masukan yang lebih luas.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Medan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, I. F. (2023). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. 1101001, 790. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Medan*. (n.d.). Retrieved October 10, 2023, from <https://medankota.bps.go.id/indicator/23/88/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Delfi Heni Susanti, Dastin Pratiwi, & Farida Hani Sri Wahyuni. (2022). Implementasi Kebijakan Pkh Dalam Rangka Mengatasi Kemiskinan Di Kecamatan Rowokangkung Dimasa Pandemi. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 38–51. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.503>
- Dinas Sosial Kota Medan*. (2023).
- Imron, I., Soeaidy, M. S., & Ribawanto, H. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(3), 485–491.
- Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Wetlands International.
- Nasmi, M. H., & Dt.Maani, K. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kecamatan Bintang Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1–12. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i2.14>
- Program Keluarga Harapan (PKH) | Kementerian Sosial Republik Indonesia*. (n.d.). Retrieved October 10, 2023, from <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>
- Rusli, Z. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 33–40.
- Rusli, Z., Yuliani, F., Sulistianingsih, E., & Sadad, A. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP). *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2), 59–141.
- Sahib, M. (2021). Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v1i2.121>
- Simangungsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Statistik, B. P. (2023). *Kota Medan Dalam Angka 2023*. <https://medankota.bps.go.id/publication/2023/02/28/fd2c9f972ff3f33b1289067a/kota-medan-dalam-angka-2023.html>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.